

**STUDI KEPATUHAN MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR TERHADAP
KEBIJAKAN *PHYSICAL DISTANCING* TAHUN 2020**

***STUDY OF COMMUNITY COMPLIANCE IN BOGOR REGENCY TO PHYSICAL
DISTANCE POLICY IN 2020***

Riny Kusumawati

Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Jl. Segar III Kompleks Perkantoran Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, Indonesia

nabilarizqi@yahoo.co.id

ABSTRACT

The impact of Covid-19 is not only on the health aspect but also on the economy. Therefore, the Bogor Regency Government issued a policy to prevent the spread of Covid-19 from spreading, namely physical distancing by keeping a distance from crowds. However, this effort faces challenges in the field related to the level of public compliance with the policy so that the Covid-19 red zone is increasingly widespread. This study aims to obtain an overview of the level of knowledge of the people of Bogor Regency about Covid-19 and physical distancing policies, to compare the level of compliance of the people of Bogor Regency to physical distancing in the red and green zones as well as to determine the factors that influence the level of community compliance related to these policies. Respondents were selected using the incidental sampling method. Data were collected online using a questionnaire and analyzed using descriptive analysis and simple regression. The results of the study show that the percentage level of community compliance with physical distancing policies who live in the red zone is less (9.07%) compared to people in the green zone (13.60%) and vice versa in the percentage level of non-compliance with physical distancing policies. However, in general, the behavior of the people of Bogor Regency towards the physical distancing policy is very low. The level of education, type of residence and location of the sub-district proved to have a significant influence on the level of compliance of the people of Bogor Regency to the physical distancing policy.

Keywords: *Community compliance, physical distancing, Covid-19*

ABSTRAK

Dampak Covid-19 tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas yaitu *physical distancing* dengan menjaga jarak dari kerumunan. Namun upaya ini menghadapi tantangan di lapangan terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut sehingga zona merah Covid-19 semakin meluas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Bogor tentang Covid-19 dan kebijakan *physical distancing*, mengetahui perbandingan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap *physical distancing* di zona merah dan zona hijau serta mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Responden dipilih dengan menggunakan metode sampling insidental. Data dikumpulkan secara online dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan persentase tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan *physical distancing* yang tinggal di zona merah lebih sedikit (9,07%) dibandingkan dengan masyarakat di zona hijau (13,60%) dan sebaliknya pada persentase tingkat ketidakpatuhan terhadap kebijakan *physical distancing*. Namun secara umum, perilaku kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing* sangat rendah. Adapun tingkat pendidikan, tipe tempat tinggal dan lokasi kecamatan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

Kata Kunci: *Kepatuhan masyarakat, physical distancing, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dengan ancaman terburuk yaitu kematian, tetapi juga ekonomi pun ikut terkena imbas Covid-19. Beberapa artikel mencatat bahwa Covid-19 telah menyebabkan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Diawali oleh perekonomian China yang terguncang di awal tahun 2020 sebagai negara asal wabah Covid-19 dan disusul negara lainnya di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 harus turut mewaspadai dampak Covid-19 dan mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangannya baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 15 April 2020, dapat diketahui total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 5.136 pasien dengan penambahan sebesar 297 kasus baru. Sementara jumlah pasien positif Covid-19 yang sampai sekarang masih menjalani perawatan sebesar 4.221 orang. Selanjutnya, tercatat 469 pasien positif Covid-19 meninggal dunia dan yang berhasil sembuh sebesar 446 orang. Data tersebut sekaligus menunjukkan kasus positif Covid-19 sudah tersebar di 32 provinsi dan DKI Jakarta menjadi episentrum utama (Pratama, 2020).

Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang data positif Covid-19 terbanyak kedua setelah DKI Jakarta di Indonesia yaitu 540 kasus dan lonjakan kasus tertinggi sebesar 60 kasus baru. Data Situs Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) per 15 April 2020 menunjukkan 559 kasus terkonfirmasi positif. Sementara jumlah orang meninggal akibat Covid-19 di Jawa Barat yaitu 52 orang dan 23 orang dinyatakan telah sembuh dari virus ini (pikobar.jabarprov.go.id).

Berdasarkan peta sebaran Covid-19, kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) paling banyak menyumbang kasus positif Covid-19. Data Monitoring Harian Kewaspadaan Infeksi Covid-19 Kabupaten Bogor tanggal 15 April 2020 tercatat dari total jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebesar 960 orang, 558 diantaranya sembuh sehingga sisa yang masih dalam pemantauan sebesar 402 orang. Sedangkan kategori pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih menjalani proses yaitu sebesar 387 orang. Sementara 181 diantaranya sudah selesai pengawasan dari total 582 PDP. Selanjutnya, positif Covid-19 sebesar 50 orang dengan 41 orang positif aktif dan masing-masing 5 orang yang meninggal dan 4 orang yang sembuh (ppid.bogorkab.go.id)

Sejak wabah Covid-19 ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, seluruh negara terdampak menerapkan aturan ketat. Salah satunya yakni aturan tentang *physical distancing* atau usaha untuk menjaga jarak fisik antar manusia termasuk kerumunan. Tak hanya di luar rumah, *physical distancing* diharapkan bisa dilakukan juga di dalam rumah. Sebab, banyak orang yang terinfeksi Covid-19 tetapi tidak memperlihatkan gejala sehingga masyarakat harus tetap waspada. Harapannya langkah itu bisa menekan penyebaran virus Covid-19.

Saat ini, beberapa wilayah di Indonesia telah memberlakukan *physical distancing* sesuai dengan imbauan pemerintah. Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut guna mencegah penyebarluasan Covid-19. Hal ini dilandasi fakta lapangan bahwa Kabupaten Bogor termasuk wilayah dengan zona merah yang cukup banyak. Namun,

pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengingat jumlah zona merah di Kabupaten Bogor semakin bertambah. Berdasarkan peta persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor tanggal 17 April 2020 menunjukkan terdapat 14 kecamatan dengan zona merah yaitu Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Ciseeng, Parung Panjang, Ciampea, Ciomas, Ciawi. Artinya, terdapat penambahan lokasi zona merah baru dalam waktu 4 hari yang sebelumnya hanya meliputi 13 kecamatan (Silaban, 2020). Padahal, pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan ke seluruh *stakeholder* agar masyarakat mematuhi kebijakan *physical distancing* baik melalui berbagai media dan tokoh masyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait Covid-19 sangat penting untuk menekan penyebaran Covid-19. Kepatuhan masyarakat yang terkait kebijakan Covid-19 termasuk *physical distancing* erat hubungannya dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 dan kebijakan tersebut. Studi menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan tentang Covid-19 terhadap kebijakan Covid-19 dan *physical distancing* (Utami, 2020; Sari dan Atiqoh, 2020; Zulhafandi dan Ariyanti, 2020; Mariz *et al.*, 2020; Permatasari, 2020; Mujiburrahman *et al.*, 2020). Hasil penelitian Yanti *et al.* (2020) menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan baik memiliki sikap positif dan perilaku yang baik terhadap upaya pencegahan Covid-19. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Covid 19 yang tinggi akan diikuti perilaku masyarakat tentang pencegahan dan penularan Covid-19 yang baik (Purnamasari dan Rahayani, 2020).

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing* (Wiranti *et al.*, 2020). Penelitian Putra (2020) menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang berpendidikan pascasarjana, bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, guru, dan pegawai swasta. Selain itu, dapat diketahui bahwa pengetahuan dan lingkungan berpengaruh positif signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Bogor tentang Covid-19 dan kebijakan *physical distancing*, mengetahui perbandingan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap *physical distancing* di zona merah dan zona hijau serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan *physical distancing* di Kabupaten Bogor yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tipe tempat tinggal (desa/kota) dan lokasi kecamatan tempat tinggal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui penyebab ketidakpatuhan masyarakat dan strategi untuk mengatasinya dalam upaya mengimplementasikan kebijakan *physical distancing* di Kabupaten Bogor secara lebih luas.

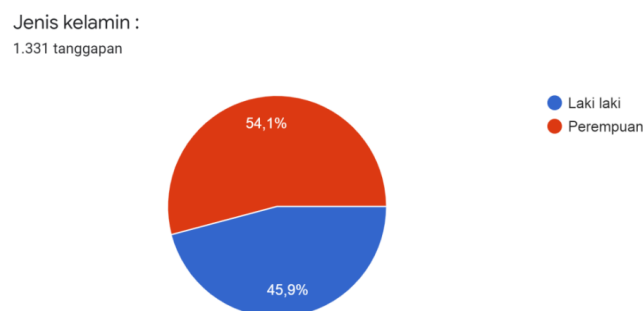
2. METODE PENELITIAN

Responden penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode sampling insidental (*nonprobability sampling*) dengan jumlah 1.342 orang yang tersebar di 40 kecamatan. Metode pengumpulan data menggunakan angket yang disebar selama 2 hari menyebarkan kuesioner kepada para responden secara online melalui *Google Form*. Data dianalisis menggunakan

analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana terhadap lima variabel dependen (usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tipe tempat tinggal (desa/kota) dan lokasi kecamatan tempat tinggal) terhadap variabel independen yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terkait kebijakan *physical distancing*. Jika diperoleh nilai $t < 0.05$ (signifikan), artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

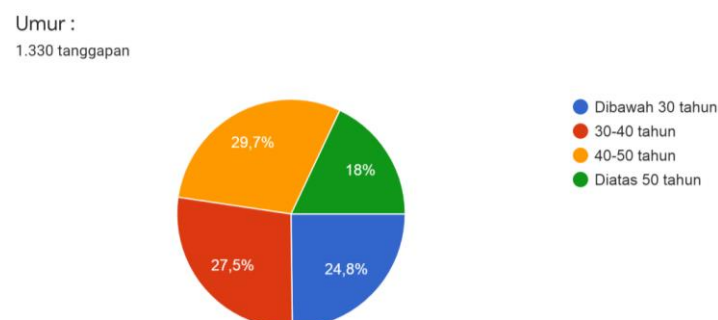
3.1. Gambaran Karakteristik Responden



Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 1. Dapat diketahui distribusi responden menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 54,1% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 45,9%, dengan selisih sekitar 8,2%. Sementara, responden menurut kategori umur responden yang terbesar adalah umur 40-50 tahun yaitu sebesar 29,7%, kemudian umur 30-40 tahun yaitu sebesar 27,5%, dibawah umur 30 tahun yaitu sebesar 24,8% dan yang terakhir umur diatas 50 tahun sebesar 18% (Gambar 2). Artinya, responden diwakili oleh kategori umur orang dewasa yang produktif dengan tingkat kematangan emosi yang cukup.



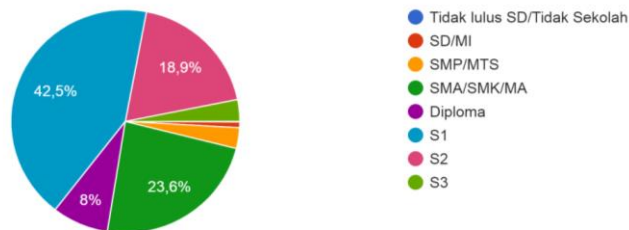
Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 2. Distribusi Responden Menurut Umur

Tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah lulusan S-1 yaitu sebesar 42,5% dan lulusan SMA/SMK/MA sebesar 23,6% serta lulusan S-2 sebesar 18,9%, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Tercatat bahwa lulusan S3 sebesar 3,2%, lulusan SMP/MTS sebesar 2%,

lulusan SD/MI sebesar 0,8% dan tidak ada responden yang tidak lulus SD/tidak bersekolah. Hal ini menandakan bahwa jawaban yang diberikan responden sudah terfikirkan dengan seksama karena rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Tingkat pendidikan :
1.330 tanggapan

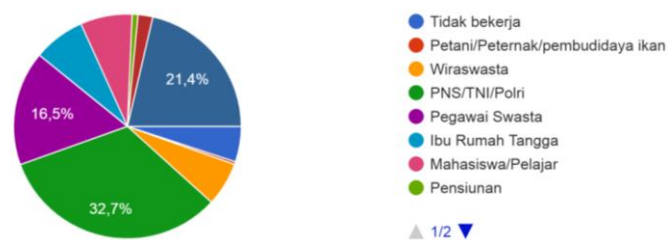


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 3. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden yang menjawab kuesioner dari latar belakang pekerjaan mayoritas adalah PNS/TNI/Polri yaitu sebesar 32,7%, lainnya sebesar 21,4% dan pegawai swasta sebesar 16,5%. Responden ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar masing-masing sebesar 7,4%, wiraswasta sebesar 6,3%, kemudian responden yang tidak bekerja sebesar 5,1%, buruh sebesar 2,1% dan pensiunan sebesar 0,8%. Pekerjaan lainnya yang tidak termasuk dalam daftar jawaban adalah diluar Tidak bekerja, Petani/Peternak/pembudidaya ikan, Wiraswasta, PNS/TNI/Polri, Pegawai Swasta, Ibu Rumah Tangga, Mahasiswa/Pelajar, Pensiunan dan Buruh, sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Tidak ada responden yang mewakili pekerjaan petani/peternak/pembudidaya ikan dalam menjawab kuesioner studi ini.

Pekerjaan :
1.331 tanggapan

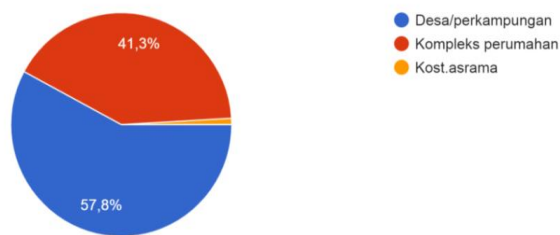


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 4. Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Disisi lain, jika dilihat dari tipe tempat tinggal responden yang menjawab pertanyaan secara online, mayoritas bertempat tinggal di perdesaan/perkampungan, yaitu sebesar 57,8% dibandingkan dengan di kompleks perumahan (perkotaan) hanya sebesar 41,3%, dan responden yang tinggal di kost/asrama sebesar 0,9%. Artinya, data tersebut mewakili karakteristik masyarakat Kabupaten Bogor yang sebagian besar memang tinggal di perkampungan/pedesaan. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 5.

Tempat tinggal :
1.326 tanggapan

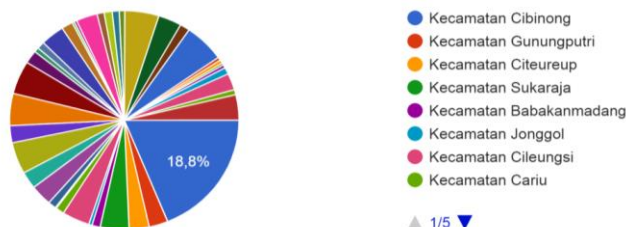


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 5. Distribusi Responden Menurut Tempat Tinggal

Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat lokasi asal kecamatan responden dimana semua kecamatan di Kabupaten Bogor telah terwakili keberadaannya walaupun tidak proporsional dengan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Mayoritas responden berasal dari kecamatan Cibinong sebesar 18,8%, diikuti oleh Kecamatan Klapanunggal sebesar 5,9% dan Kecamatan Ciomas sebesar 5%. Sementara kecamatan dengan jumlah responden terkecil adalah Kecamatan Sukamakmur, Tenjo, Cigudeg dan Sukajaya. Hal ini dapat dipahami mengingat keterbatasan akses terhadap teknologi, kendala geografis, waktu, sumber daya dan penyebaran informasi kuesioner yang singkat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.

Lokasi kecamatan tempat tinggal di Kabupaten Bogor :
1.307 tanggapan



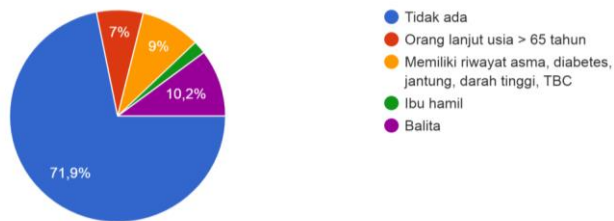
Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 6. Distribusi Responden Menurut Kecamatan

3.2. Gambaran Survey Kebijakan *Physical Distancing* Tahun 2020

Responden yang memiliki anggota keluarga (serumah) yang rentan terhadap Covid-19 dapat dilihat pada Gambar 7. Mayoritas responden menjawab tidak memiliki anggota keluarga (serumah) yang rentan terhadap Covid-19 (71,9%). Namun, banyak responden yang masih memiliki balita yaitu sebesar 10,2 % dan tinggal dengan anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit penyerta (asma, diabetes, jantung, darah tinggi, TBC) yaitu sebesar 9%, tinggal dengan orangtua lanjut usia (diatas 65 tahun) yaitu sebesar 7% dan juga tinggal dengan ibu hamil sebesar 2%. Hal ini tentu patut diwaspadai mengingat pada kondisi anggota keluarga tersebut sangat berbahaya jika terinfeksi Covid-19 sehingga kepatuhan terhadap kebijakan *physical distancing* harus dilaksanakan dengan baik.

Apakah ada anggota keluarga terdekat yang rentan terhadap covid-19 (serumah) :
1.318 tanggapan

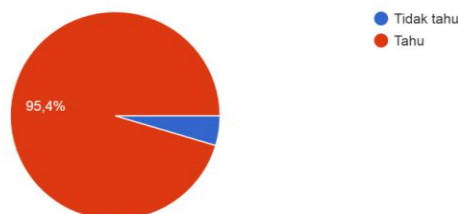


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 7. Anggota Keluarga Responden yang Rentan terhadap Covid-19

Gambar 8. menunjukkan tingkat pengetahuan responden tentang kebijakan *physical distancing* dimana mayoritas responden menyatakan telah mengetahui informasi tentang kebijakan *physical distancing* di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 95,4% dan responden ini terwakili di 40 kecamatan dibandingkan dengan responden yang tidak mengetahui hanya sebesar 4,6%. Menariknya, data responden yang menjawab tidak tahu, rata-rata menjawab sumber informasi tentang kebijakan *physical distancing* adalah dari media sosial dan media elektronik dengan lembaganya yaitu pemerintah dan wartawan/jurnalis. Artinya, mereka mengetahui informasi tersebut, hanya mungkin tidak jelas.

Apakah saudara mengetahui informasi tentang kebijakan physical distancing ?
1.325 tanggapan

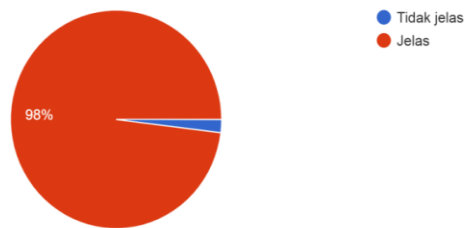


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 8. Informasi/Pengetahuan tentang Kebijakan *Physical Distancing*

Kondisi yang sama terjadi pada jawaban pertanyaan tentang kejelasan informasi Covid-19, dimana hampir seluruh responden menyatakan telah jelas informasi tentang bahaya Covid-19. Hal ini terlihat pada Gambar 9 yaitu sebesar 98% menyatakan memperoleh kejelasan informasi Covid-19 dan hanya sebesar 2% yang menyatakan tidak mendapatkan informasi Covid-19 dengan jelas. Rata-rata responden yang menjawab informasi tidak jelas menyatakan sumber informasi tersebut berasal dari media sosial dan media elektronik. Artinya, mereka mengetahui informasi tersebut, hanya mungkin tidak/kurang jelas karena seringkali munculnya *hoax* di berbagai media yang beredar di masyarakat.

Apakah informasi tentang covid-19 dan bahayanya sudah cukup jelas ?
1.330 tanggapan

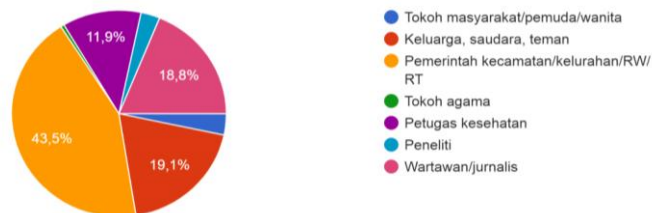


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 9. Kejelasan Informasi tentang Covid-19 dan Bahayanya

Analisis selanjutnya adalah mengetahui darimana sumber informasi yang diperoleh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 10. Mayoritas responden menjawab bahwa mereka mengetahui dari pemerintah kecamatan/kelurahan/RW/RT yaitu sebesar 43,5%, dari keluarga/saudara teman sebesar 19,1%, dari wartawan/jurnalis sebesar 18,8%, dari petugas kesehatan sebesar 11,9%, dari tokoh masyarakat/wanita/pemuda sebesar 3,3%, dari peneliti sebesar 2,9% dan dari tokoh agama sebesar 0,5%.

Dari siapa anda mengetahui tentang informasi covid 19 dan physical distancing ?
1.323 tanggapan

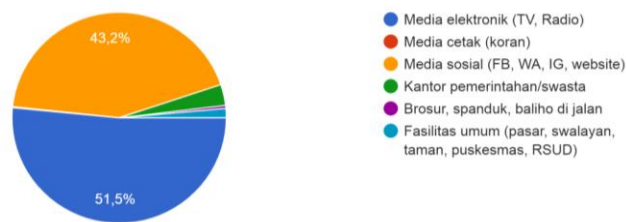


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 10. Sumber Informasi tentang Covid-19 dan *Physical Distancing* yang Diterima Responden

Selain mengetahui sumber informasi, penelitian ini juga menggali informasi tentang jenis media yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang Covid-19 dan *physical distancing* sebagaimana terlihat pada Gambar 11. Mayoritas responden menjawab bahwa mereka mengetahui informasi tersebut dari media elektronik (TV/radio) yaitu sebesar 51,5% dan dari media sosial baik facebook, instagram, whatsapp dan website sebesar 43,2%. Responden yang menjawab mengetahui dari kantor pemerintahan/swasta sebesar 3,2%, dari fasilitas umum (pasar, swalayan, puskesmas, RSUD) sebesar 1,4% dan dari brosur, spanduk dan baliho di jalan raya sebesar 0,5%. Sementara, responden yang menjawab kuesioner pada kajian ini tidak ada yang mengetahui informasi tentang Covid-19 dan *physical distancing* dari media cetak (0%).

Dari media mana anda mengetahui tentang informasi covid 19 dan physical distancing ?
1.331 tanggapan

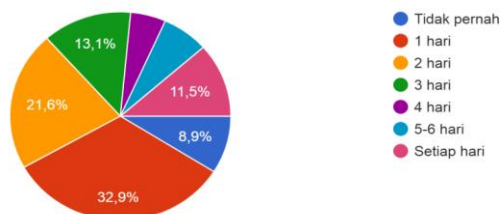


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 11. Media Informasi tentang Covid-19 dan *Physical Distancing* yang Dibaca/Dilihat/Didengar oleh Responden

Frekuensi aktivitas responden rata-rata di luar rumah dalam seminggu terakhir (7-14 April 2020) dapat dilihat pada Gambar 12. Mayoritas responden keluar rumah 1 hari dalam seminggu sebesar 32,9%, kemudian 2 hari dalam seminggu sebesar 21,6% dan 3 hari dalam seminggu sebesar 13,1%. Namun, hal yang harus dicermati dari data penelitian ini adalah responden yang keluar rumah setiap hari cukup tinggi yaitu sebesar 11,5%, yang keluar rumah selama 6 hari dalam seminggu sebesar 6,8% dan yang keluar rumah selama 4-5 hari sebesar 5,2%. Tentunya kondisi tersebut amat memprihatinkan mengingat rata-rata responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta mayoritas pekerjaannya PNS/TNI/Polri yang seharusnya memiliki pemahaman yang baik terkait aktivitas di luar rumah pada masa Covid-19.

Berapa hari anda keluar rumah dalam seminggu terakhir ?
1.331 tanggapan

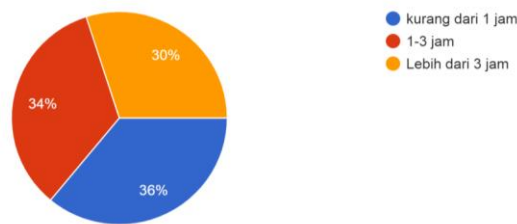


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 12. Frekuensi Aktivitas Responden Rata-Rata di Luar Rumah dalam Seminggu Terakhir

Gambar 13 menunjukkan durasi rata-rata responden beraktivitas diluar rumah dimana mayoritas responden keluar rumah rata-rata selama kurang dari 1 jam sebesar 36%, 1-3 jam sebesar 34% dan lebih dari 3 jam sebesar 30%. Hal ini mengindikasikan responden benar-benar hanya keluar untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan amat penting dan bukan untuk hal-hal yang dilarang pemerintah (tidak bermaksud untuk melanggar aturan *physical distancing*).

Berapa lama rata-rata anda berada diluar rumah saat keluar rumah seminggu terakhir ?
1.314 tanggapan

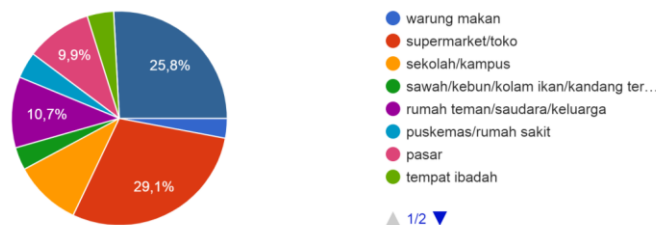


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 13. Durasi Rata-Rata Responden Beraktivitas Diluar Rumah

Hal ini tergambar juga dalam Gambar 14 yang menunjukkan lokasi tujuan yang paling sering dikunjungi jika keluar rumah dalam seminggu terakhir. Mayoritas responden pergi ke supermarket/toko yaitu sebesar 29,1%, ke tempat kerja sebesar 25,8%, ke rumah teman/saudara/keluarga sebesar 10,7% dan ke pasar sebesar 9,9% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu yang bepergian ke kampus/sekolah sebesar 10%, ke tempat ibadah dan puskesmas sebesar 4%, ke sawah/kebun/kolam ikan sebesar 3,4%, ke warung makan sebesar 3% dan tidak ada yang menjawab pergi ke tempat rekreasi/hiburan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Tempat yang paling sering dikunjungi keluar rumah dalam seminggu terakhir ?
1.308 tanggapan

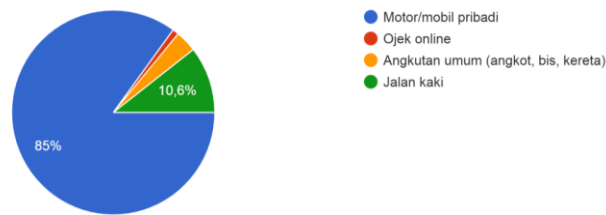


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 14. Tempat yang Paling Sering dikunjungi Oleh Responden Selama Seminggu Terakhir

Hasil penelitian juga menunjukkan mayoritas responden menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor saat bepergian ke luar rumah, yaitu sebesar 85%. Kemudian, yang memilih untuk berjalan kaki sebesar 10,6% dengan alasan lokasi yang dituju cukup dekat. Sementara responden yang menggunakan angkutan umum (angkot, bis, kereta) sebesar 3,4% dan yang menggunakan ojek online sebesar 1%. Jumlah yang lebih sedikit karena masyarakat mengkhawatirkan kebersihan dan takut akan penularan wabah Covid-19 di angkutan umum, sebagaimana terlihat pada Gambar 15.

Jenis transportasi yang digunakan saat keluar rumah :
1.317 tanggapan

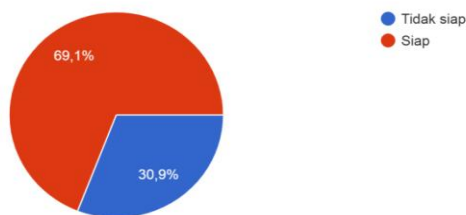


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 15. Jenis Transportasi yang Digunakan oleh Responden

Gambar 16 terlihat bahwa responden menganggap baik pemerintah pusat dan daerah sangat siap dalam menghadapi Covid-19 yaitu sebesar 69,1%. Sementara responden yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak siap hanya sebesar 30,9%. Hal ini menunjukkan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Covid-19 cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

Menurut anda, apakah Pemerintah Pusat dan Kabupaten Bogor siap menghadapi corona :
1.318 tanggapan

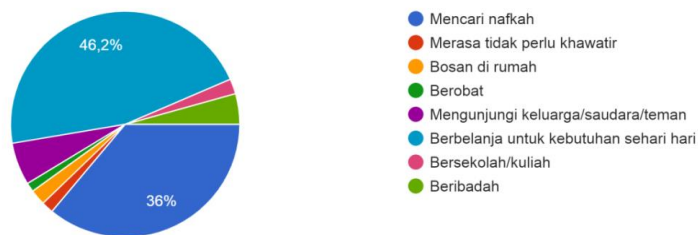


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 16. Persepsi Responden terhadap Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor Menghadapi Bahaya Virus Covid-19

Alasan dominan responden keluar rumah, walaupun telah mengetahui adanya bahaya Covid-19 dan kebijakan *physical distancing* dapat diketahui dari Gambar 17. Mayoritas responden keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yaitu sebesar 46,2%, dan mencari nafkah/bekerja yaitu sebesar 36% dan sisanya bertujuan mengunjungi keluarganya yaitu sebesar 6,1%. Selanjutnya, alasan pergi ke sekolah/kampus sebesar 2,2%, ke tempat ibadah sebesar 4,4%, berobat sebesar 1,3%, ada pula yang bosan di rumah sebesar 2,2% dan ada yang merasa tidak perlu khawatir untuk pergi keluar rumah yaitu sebesar 1,7%. Kelompok responden yang merasa bosan dan tidak perlu khawatir untuk pergi keluar rumah inilah yang perlu diberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang bahaya Covid-19 dan pentingnya mematuhi kebijakan *physical distancing* agar tidak terjadi penyebaran virus yang semakin meluas di Kabupaten Bogor.

Apakah alasan dominan anda keluar rumah walau sudah mengetahui tentang kebijakan physical distancing ?
1.302 tanggapan

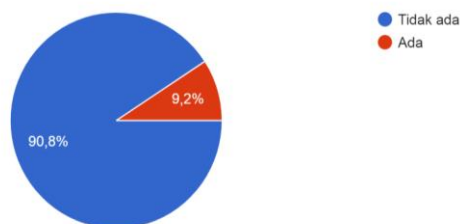


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 17. Alasan Dominan Responden Keluar Rumah

Gambar 18 menunjukkan pengetahuan responden tentang bantuan Covid-19 dari pemerintah pada masa pemberlakuan kebijakan *physical distancing*. Sebagian responden masih belum mengetahui tentang adanya bantuan Covid-19 dari pemerintah Kabupaten Bogor yaitu sebesar 90,8%. Sementara sisanya sebesar 9,2% responden telah mengetahui adanya bantuan Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bogor, seperti masker, hand sanitizer, baju APD, sembako, beras, bantuan untuk UKM, petani, untuk masyarakat miskin dan sebagainya.

Apakah sudah ada bantuan selama kebijakan social distancing dari pemerintah :
1.325 tanggapan



Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 18. Pengetahuan Masyarakat Tentang Ada Tidaknya Bantuan Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bogor

Sikap responden terhadap kebijakan *physical distancing* dapat dilihat pada Gambar 19. Mayoritas responden menyatakan sikap setuju terhadap adanya kebijakan *physical distancing* di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 98,1%. Sementara sisanya sebesar 1,9% menyatakan sikap tidak setuju. Hal ini menunjukkan sikap kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing* sangat baik.

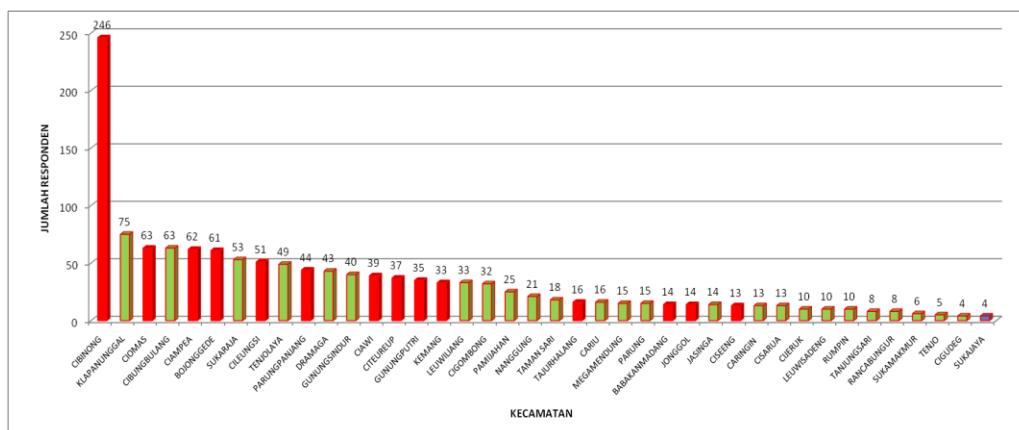


Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 19. Sikap Responden terhadap Kebijakan Physical Distancing

3.3. Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Bogor terhadap Physical Distancing di Zona Merah Dengan Zona Hijau

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor tanggal 17 April terdapat 14 kecamatan yang masuk kategori zona hijau yaitu Kecamatan Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Ciseeng, Parung Panjang, Ciampea, Ciomas, Ciawi. Sementara 26 kecamatan lainnya berada dalam kategori zona merah. Hal ini terlihat pada Gambar 20.

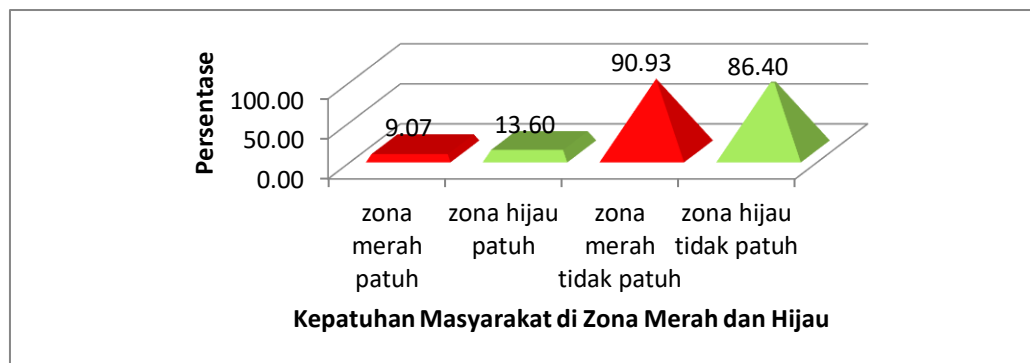


Sumber: Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, 2020

Gambar 20. Kategori Kecamatan di Kabupaten Bogor ke dalam Zona Merah dan Zona Hijau Tanggal 17 April 2020

Gambar 21 menunjukkan perbandingan tingkat kepatuhan masyarakat kabupaten bogor terhadap *physical distancing* di zona merah dengan zona hijau dimana responden yang tinggal di kecamatan dengan zona merah memiliki tingkat kepatuhan lebih sedikit dibandingkan dengan responden di zona hijau yaitu masing-masing sebesar 9,07% dan 13,60%. Demikian pula sebaliknya, ketidakpatuhan lebih didominasi oleh responden yang berada di zona merah yaitu sebesar 90,93% dibandingkan dengan responden di zona hijau yaitu sebesar 86,40%. Dengan demikian dapat dimaklumi jika penyebaran Covid-19 lebih banyak di kecamatan dengan zona merah. Namun yang perlu dicermati bahwa tingkat perilaku kepatuhan masyarakat

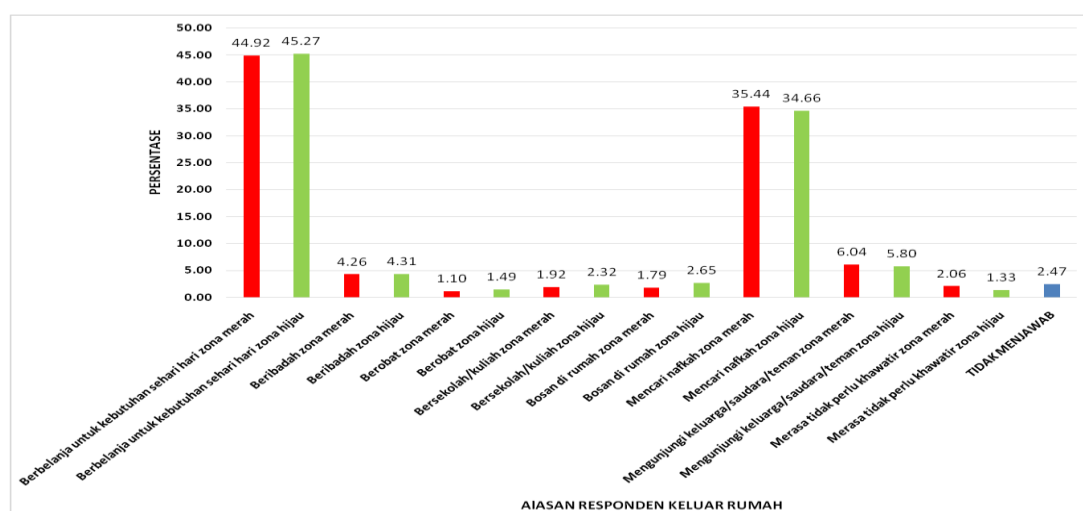
kabupaten bogor terhadap *physical distancing* masih cukup rendah dan berbanding terbalik dengan pernyataan sikap kepatuhan terhadap *physical distancing*.



Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 21. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Responden di Kecamatan Zona Merah dengan Zona Hijau

Jika dilihat dari alasan keluar rumah antara responden yang tinggal di kecamatan zona merah dan zona hijau (Gambar 22.) terlihat pola yang sama antara responden yang tinggal di kecamatan dengan zona merah dan zona hijau dimana didominasi alasan keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah dan mengunjungi keluarga serta berobat. Pola penyebaran responden yang hampir sama antara zona merah dengan zona hijau juga terlihat untuk alasan bosan merasa di rumah dan merasa tidak perlu khawatir akan situasi seperti sekarang (menganggap remeh situasi Covid-19). Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dimana upaya edukasi dan sosialisasi terkait *physical distancing* harus dilaksanakan lebih intensif ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor agar zona merah tidak meluas. Terbukti dalam perjalanannya per tanggal 24 April 2020 sudah terdapat penambahan 3 kecamatan lagi di zona merah, sehingga menjadi 17 kecamatan zona merah di Kabupaten Bogor dari total 40 kecamatan.



Sumber: Survey Kebijakan *Physical Distancing*, 2020

Gambar 22. Perbandingan Alasan Keluar Rumah antara Responden yang Tinggal di Kecamatan Zona Merah dengan Zona Hijau

3.4. Analisis Regresi Sederhana

- a) *Analisis Regresi antara Faktor Usia dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Physical Distancing*

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi antara Faktor Usia dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap *Physical Distancing*

	Column 1	Column 2
Column 1	1	
Column 2	0.040131	1

Sumber: Hasil Olah Data Survei, 2020

Dari Tabel 1. diatas dapat diketahui nilai t sebesar 0.04 (<0.05) yang artinya signifikan, maka H_0 ditolak/ H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh (korelasi) yang signifikan antara faktor usia dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

- b) *Analisis Regresi antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Physical Distancing*

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap *Physical Distancing*

	Column 1	Column 2
Column 1	1	
Column 2	0.046105	1

Sumber: Hasil Olah Data Survei, 2020

Tabel 2. Menunjukkan nilai t sebesar 0.046 (<0.05) yang artinya signifikan, maka H_0 ditolak/ H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh (korelasi) yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

- c) *Analisis Regresi antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Physical Distancing*

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap *Physical Distancing*

	Column 1	Column 2
Column 1	1	
Column 2	0.094968	1

Sumber: Hasil Olah Data Survei, 2020

Dari hasil analisis regresi sederhana pada Tabel 3. diatas diperoleh nilai t sebesar 0.095 (>0.05), artinya tidak signifikan, maka H_0 diterima/ H_1 ditolak. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh (korelasi) yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

d) *Regresi antara Tipe Tempat Tinggal dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Physical Distancing*

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi antara Tipe Tempat Tinggal dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap *Physical Distancing*

	Column 1	Column 2
Column 1	1	
Column 2	-0.03488	1

Sumber: Hasil Olah Data Survei, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pada Tabel 4. diatas diperoleh nilai t sebesar -0.035 (<0.05), artinya signifikan, maka H_0 ditolak/ H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh (korelasi) yang signifikan antara tipe tempat tinggal dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*. Adapun nilai bertanda negatif menunjukkan korelasi yang berlawanan, dimana masyarakat yang tinggal di perumahan lebih patuh dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kampung/desa.

e) *Regresi antara Kecamatan Asal Responden dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Physical Distancing*

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi antara Kecamatan Asal Responden dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap *Physical Distancing*

	Column 1	Column 2
Column 1	1	
Column 2	0.013087	1

Sumber: Hasil Olah Data Survei, 2020

Tabel 5. Diatas dapat diketahui bahwa nilai t sebesar 0.013 (<0.05), artinya signifikan, maka H_0 ditolak/ H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh (korelasi) yang signifikan antara kecamatan asal responden dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

3.5. Analisis Penyebab dan Strategi Antisipasi Ketidakepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan *Physical Distancing*

Pandemi Covid-19 merupakan bentuk bahaya (hazard) yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada masyarakat di Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi kerentanan sosial (*social*

vulnerability) menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (*community resilience*) mengalami guncangan (*shock*) akibat pandemi Covid-19.

Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman-nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan).

Hal inilah yang dapat kita lihat mengapa kebijakan mengenai *physical distancing* tidak berjalan dengan efektif. Alasannya kebijakan *physical distancing* dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang sumber pemasukan ekonominya didapat sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap (seperti pedagang dan ojek online).

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah masyarakat yang berstatus pekerja formal sebesar 55.272.968 orang dan masyarakat yang berstatus pekerja informal sejumlah 74.093.224 orang. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, dan inilah yang membuat mengapa masih banyak masyarakat tidak menjalankan kebijakan *physical distancing*, karena untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya.

Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat yang terjadi saat ini. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat merupakan kulminasi dari kerentanan sosial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pertama, tindakan apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan kebijakan *physical distancing*. Masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas berkumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itu, mayoritas masyarakat memilih kembali ke kampung halamannya baik karena alasan ekonomi maupun mudik hari raya. Tindakan pulang kampung masyarakat ini rupanya justru meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dan sebaran wilayahnya, baik yang berstatus ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan) dan suspect Covid-19.

Secara sosiologis tidak dapat dikatakan salah terhadap apa yang dilakukan masyarakat tersebut diatas, mengingat hal tersebut sebagai bentuk respon dari kerentanan sosial yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi fokus pemerintah untuk mengambil langkah memulihkan ketahanan sosial masyarakat agar tidak melakukan tindakan apatis saat bangsa dan negara ini dihadapkan pandemi Covid-19.

Kedua, tindakan irasional dimana tidak sedikit masyarakat meyakini berbagai ramuan obat dan metode pencegahan agar tidak terinfeksi Covid-19 sekalipun belum ada bukti ilmiahnya. Misalnya saja ada masyarakat yang meyakini bahwa metode berbaring untuk berjemur di atas rel kereta api dapat membantu mencegah penularan Covid-19. Apa yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan bahan obat dan metode tertentu untuk mencegah tertularnya dari Covid-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya ini tidak lepas dari keterikatan masyarakat atas

cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) yang berlaku pada lingkungan kehidupannya. Secara sosiologis, tindakan sosial ini disebut dengan tindakan tradisional.

Tindakan irasional lainnya, yaitu *panic buying*. Panic buying menjadi respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ini justru malah membuat berbagai harga kebutuhan melonjak tinggi dan menjadi langka karena adanya penimbunan ilegal. Tindakan irasional lainnya adalah mengajukan pinjaman ke rentenir, baik yang berbasis pinjaman konvensional maupun pinjaman online (fintech). Padahal masyarakat secara sadar paham akan risiko dari pinjaman tersebut. Hal tersebut terpaksa dilakukan sebagai mekanisme keberlangsungan hidup bagi diri dan keluarganya di saat kondisi ekonomi tidak menentu pada pandemi Covid-19 ini.

Antisipasi terhadap hal di atas adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jenis pinjaman yang legal dan risikonya. Jika tidak, tindakan meminjam ke rentenir akan menambah masalah baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mencari tahu terlebih dahulu tentang kredibilitas pihak atau lembaga pinjaman rentenir legal atau ilegal di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id) sebelum mengajukan pinjaman. Pihak pemerintah (dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia) juga harus membuat regulasi yang ketat dan tegas untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari pihak atau lembaga pinjaman rentenir tersebut. Jika tidak, masalah masyarakat kepada pihak atau lembaga pinjaman rentenir ini akan menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah kemudian harinya (setelah pandemi Covid-19 teratasi).

Ketiga, tindakan kriminal. Hal yang paling dikhawatirkan dari kerentanan sosial atas pandemi Covid-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian, penjembutan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Contoh nyata dari tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini dapat diketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di negara lain (seperti Italia, India, China, Amerika), bahkan di Indonesia sudah mulai terdapat kasus pencurian dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tindakan kriminal yang dilakukan oknum masyarakat sebagai dampak kerentanan sosial yang dihadapinya, setidaknya dapat dipahami dalam tiga konteks secara sosiologis. Pertama, dasarnya masyarakat itu berada dalam kondisi stabil, sistem-sistem kehidupannya beroperasi secara lancar dan berfungsi. Namun, akibat pandemi Covid-19, kondisi kestabilan dan keberfungsian ini terganggu. Agar dapat berada pada posisi stabil dan berfungsi, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kapital dengan baik, maka jalan singkat yang berisiko akan dilakukannya.

Kedua, tindakan kriminal terjadi karena aturan-aturan yang mengatur tingkah laku berbenturan. Misal, pemerintah menginstruksikan masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, sementara pemerintah tidak menyiapkan instrumen untuk melindungi ketahanan masyarakat yang pekerjaannya disektor informal. Selanjutnya yang ketiga adalah tindakan kriminal terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Misalnya, tidak

adanya sanksi tegas dan efek jera bagi oknum yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 ini untuk kepentingan dirinya dan memperkaya dirinya, seperti penimbunan dan pemalsuan cairan hand sanitizer dan obat-obatan yang kemudian dijual bebas di masyarakat.

Tiga tindakan yang dijelaskan di atas merupakan gambaran sebagian dari dampak kerentanan sosial yang akan terjadi di masyarakat akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sebelum pemerintah menerapkan kebijakan *physical distancing* harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebijakan pemerintah didukung penuh oleh masyarakat dan berjalan efektif dimana masyarakat memiliki ketahanan sosial pada diri dan keluarganya.

Instrumen awal yang harus disiapkan dalam melaksanakan kebijakan *physical distancing* guna meminimalisir kerentanan sosial masyarakat adalah dengan menyiapkan kebijakan *social safety net* terlebih dahulu. Hal ini didasari alasan bahwa ada potensi kerentanan sosial beserta dampaknya yang akan muncul pada masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Pada konteks kebijakan *social safety net* di masyarakat, diharapkan pemerintah tidak menggunakan pola seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Studi menunjukkan bahwa pola BLT yang ada di Indonesia memiliki keterbatasan. Pertama, distribusi yang tidak merata. Kedua, memicu adanya praktek korupsi dan nepotisme. Ketiga, lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga. Dan keempat, memicu terjadi konflik di masyarakat akibat kecemburuan yang terjadi di masyarakat akibat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Hal yang setidaknya perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah saat kebijakan *social safety net* dirumuskan, yaitu: Pertama, sejauh mana masalah sosial ini dapat teratasi; Kedua, sejauhmana kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi; Ketiga, sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat disediakan dan; Keempat, sejauh mana masyarakat tidak mengalami ketergantungan setelah kebijakan ini berakhir.

Pola penerapan kebijakan *social safety net* dapat dilihat dalam bentuk program, aktor yang terlibat dan mekanisme distribusinya. Ketiga hal ini dapat menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan *social safety net* sebagai upaya antisipasi potensi kerentanan sosial beserta dampaknya akibat diberlakukan kebijakan *physical distancing*.

Pada bentuk program, setidaknya pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk uang, tetapi berbentuk sembako, multi vitamin dan obat-obatan, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan keringanan pembayaran cicilan pinjaman masyarakat (baik pinjaman multiguna, KPR, maupun bentuk pinjaman lainnya kepada lembaga pinjaman milik pemerintah maupun swasta) sampai batas waktu kebijakan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat ketentuan terkait masyarakat penerima bantuan agar tepat sasaran/

Pada konteks aktor yang terlibat, saat ini sudah banyak kegiatan voluntaristik yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk turut membantu pemerintah, petugas medis, dan masyarakat pada umumnya yang sedang dihadapkan pada pandemi Covid 19, seperti menjadi relawan medis, memberikan masker, pemberian hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat, bahkan kegiatan penggalangan dana. Kegiatan voluntaristik masyarakat ini sebenarnya dapat menjadi mitra bagi pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Selain mitra yang berasal dari masyarakat, pemerintah juga dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan sektor swasta

(perusahaan) untuk membantu menjalankan berbagai kebijakan *social safety net*. Masing-masing pihak tentu memiliki fungsi dan kewajibannya sebagai institusi sosial di masyarakat.

Pemerintah dapat melibatkan perguruan tinggi menjadi mitra dalam memecahkan persoalan yang terjadi dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga perguruan tinggi bisa dilibatkan untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan *social safety net* di masyarakat. Untuk sektor swasta, pemerintah dapat melibatkan dalam kegiatan penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi diharapkan pelaksanaan kebijakan *social safety net* tidak hanya bersumber dari APBN maupun APBD, tetapi juga bantuan dana sosial dari sektor swasta.

Berikutnya mekanisme distribusi. Pelaksanaan kebijakan *social safety net* di masyarakat, pemerintah harus benar-benar merumuskan secara detail bagaimana mekanisme distribusinya. Jangan sampai karena kurangnya koordinasi, dan tidak detail instruksi mekanisme distribusi, pelaksanaan kebijakan *social safety net* di masyarakat tidak tepat sasaran dan bahkan tidak maksimal. Mekanisme distribusi ini perlu melibatkan peran aktif ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pihak keamanan, dan juga perguruan tinggi untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan oleh oknum tertentu untuk kepentingan diri maupun kelompoknya.

Penerapan buka tutup jalan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bogor tetap dapat dilakukan secara situasional. Apabila pihak yang berwenang melihat adanya potensi keramaian di satu titik tertentu, maka buka tutup jalan dapat dilakukan. Opsi tersebut perlu dilakukan karena tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Bogor yang masih rendah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui dengan jelas informasi tentang Covid-19 dan kebijakan *physical distancing* yang diperoleh dari media massa maupun pemerintah. Namun, mayoritas responden tidak mengetahui adanya bantuan Covid-19 dari pemerintah sebagai dampak kebijakan *physical distancing*. Hal yang menarik, mayoritas responden menyatakan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Covid-19.

Perbandingan tingkat kepatuhan responden terhadap *physical distancing* di zona merah dengan zona hijau dimana responden yang tinggal di kecamatan dengan zona merah memiliki tingkat kepatuhan lebih sedikit dibandingkan dengan responden di zona hijau dan sebaliknya. Namun yang perlu dicermati bahwa tingkat perilaku kepatuhan responden terhadap *physical distancing* masih cukup rendah dan berbanding terbalik dengan pernyataan sikap kepatuhan terhadap *physical distancing*. Adapun alasan tindakan keluar rumah menunjukkan pola yang hampir sama baik responden pada zona merah maupun zona hijau.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana terhadap kelima variabel dependen dapat diketahui bahwa: faktor usia, tingkat pendidikan, lokasi dan asal kecamatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap kebijakan *physical distancing*.

Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan *physical distancing* adalah karena faktor kerentanan sosial. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan

penerapan kebijakan *social safety net* sebagai upaya antisipasi potensi kerentanan sosial beserta dampaknya akibat diberlakukan kebijakan *physical distancing*.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel dan melibatkan unsur yang berhubungan langsung dengan kebijakan *physical distancing* dengan sampel yang proporsial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariz, N., Aziz, M., & Ma'mun, A. (2020). *Hubungan Pengetahuan tentang Covid-19 dengan Kepatuhan Upaya Pencegahan (Pemakaian Masker, Mencuci Tangan, dan Physical Distancing pada Masyarakat Kota Palembang* (Disertasi). Universitas Siwijaya, Sumatera Selatan.
- Mujiburrahman, M., Riyadi, M. E., & Ningsih, M. U. (2020). Hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan Covid-19 di masyarakat. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 2(2), 130-140.
- Permatasari, I. (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Covid-19 terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Physical Distancing pada Mahasiswa Tingkat 4 Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2020* (Disertasi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta.
- Utami, K. Q. A. N. (2020). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Kepatuhan Perilaku Physical Distancing Upaya Pencegahan Covid-19 di SMAN 2 Depok Tahun 2020* (Disertasi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta.
- Pratama, A. (2020). Corona RI 15 April: 5.136 Positif, 446 Sembuh, 469 Meninggal. Retrieved Mei 14, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160350-16-152164/corona-ri-15-april-5136-positif-446-sem-buh-469-meninggal>
- Purnamasari, I., & Raharyani, A. E. (2020). Tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 33-42.
- Putra, I. M. (2020). *Analisis Determinan Kepatuhan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Protokol Kesehatan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Sari, D., Atiqoh, N. 2020. Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit Covid-19 di Ngrongga. *INFOKES*, 10(1), 52-55.
- Silaban, M.W. (2020). Zona Merah Virus Corona di Kabupaten Bogor Meluas ke 13 Kecamatan Retrieved Mei 20, 2020, from <https://metro.tempo.co/read/1331173/zona-merah-virus-corona-di-kabupaten-bogor-meluas-ke-13-kecamatan>
- Wiranti, W., Sariatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan kepatuhan masyarakat Kota Depok terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 117-124.
- Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddin, W., Novika, R. G. H., Arina, Y. M. D. A., Martani, N. S., & Nawan, N. (2020). Community knowledge, attitudes, and behavior towards social distancing policy as prevention transmission of Covid-19 In Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)*, 8, 4-14. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i0.2020.4-14>
- Zulhafandi, Z., & Ariyanti, R. (2020). Hubungan pengetahuan tentang Covid-19 dengan kepatuhan *physical distancing* di Tarakan. *Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam*, 8(2), 102-111.